

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian analisis framing pemberitaan pro-kontra penerbitan SKB aliran Ahmadiyah dalam surat kabar harian Suara Pembaruan. Yang pertama adalah deskripsi mengenai pemberitaan pro-kontra penerbitan surat keputusan bersama tiga menteri tentang Ahmadiyah di Suara Pembaruan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi media yang bersangkutan, yakni surat kabar harian Suara Pembaruan.

#### **A. PEMBERITAAN PRO-KONTRA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI TENTANG AHMADIYAH.**

Surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah, yang diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 9 Juni 2008 sebenarnya merupakan puncak dari polemik tentang Ahmadiyah yang terjadi selama ini. Tujuan pemerintah menerbitkan SKB ini pada prinsipnya adalah untuk membekukan segenap aktivitas para penganut aliran Ahmadiyah di Indonesia, namun produk hukum ini justru berbalik menjadi satu permasalahan baru. Pada dasarnya pemerintah memiliki tujuan baik, yakni ingin meredam konflik yang terjadi di masyarakat, karena aliran Ahmadiyah, namun keputusan pemerintah ini justru menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah, ada juga pihak-pihak yang setuju dengan langkah pemerintah terhadap Ahmadiyah. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah beranggapan

bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan dasar hukum dan undang-undang. Karena dalam undang-undang sendiri sudah diamanatkan bahwa setiap warga dijamin kebebasannya untuk memeluk satu keyakinan. Selain itu, dalam proses penerbitan keputusan ini, pemerintah ditekan oleh kelompok masyarakat, sehingga pemerintah tampak lebih tunduk terhadap satu kelompok masyarakat daripada konstitusi negara. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah, membuktikan pemerintah gagal menjaga kebhinekaan yang menjadi jati diri bangsa. Pemerintah juga dianggap lebih tunduk pada tekanan kelompok tertentu, daripada tunduk pada konstitusi (Suara Pembaruan, Senin, 10 Juni 2008).

Selain timbulnya penilaian bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah juga dianggap lambat dalam menangani permasalahan Ahmadiyah. Setelah insiden Monas, pemerintah seakan dikunci untuk mengeluarkan keputusan tersebut. "Kelambatan tersebut sekarang membawa beragam efek, kerukunan umat beragama tidak positif, citra pemerintah ditekan, serta tidak jelas apa manfaat dari SKB tersebut," jelas Anis Baswedan (Suara Pembaruan Rabu, 11 Juni 2008). Namun, secara garis besar penerbitan surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah justru menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikasi dampak negatif adalah banyak permasalahan yang justru timbul pasca penerbitan SKB ini, seperti permasalahan kerukunan umat beragama yang terganggu, gangguan keamanan di beberapa daerah yang didiami oleh

penganut aliran Ahmadiyah. Gangguan keamanan ini berupa tindakan kekerasan serta anarkisme yang ditujukan pada para penganut Ahmadiyah serta properti penganut aliran Ahmadiyah.

Sementara pihak-pihak yang sependapat dengan keputusan pemerintah berpandangan bahwa apapun yang diputuskan pemerintah sudah merupakan usaha terbaik yang bisa ditempuh pemerintah. Apapun arah kebijakan pemerintah pasti akan menimbulkan konflik, dan peran masyarakat disini untuk mengawasi pelaksanaan isi dari SKB tersebut.

## **B. SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN**

Suara Pembaruan adalah salah satu surat kabar nasional yang terbit sore hari, yang sejatinya bukanlah surat kabar baru. Empat Februari 1987 adalah tonggak dimulainya Suara Pembaruan berkiprah dalam pers nasional. Suara Pembaruan adalah kelanjutan dari pendahulunya, Sinar Harapan yang sempat dibreidel oleh pemerintah Orde Baru. Dengan pemerintahan ORBA (militer) sendiri, Suara Pembaruan punya pengalaman yang panjang dan berat. Belum setahun usai merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada 27 April 1986, Sinar Harapan harus menelan pil pahit. Tanggal 9 Oktober 1986, akibat pemberitaan yang bersifat mendahului pengumuman pemerintah mengenai deregulasi ekonomi Indonesia, harian ini dibreidel oleh penguasa Orde Baru. Setelah mengalami kekosongan penerbitan sekitar 4 bulan, Departemen Penerangan memberikan kembali SIUPP kepada harian ini tanggal 4 Februari 1987 dengan dua syarat : (1) nama surat kabar harus diganti menjadi “*Suara*

*Pembaruan*”. (2) Penerbit juga harus baru, yang menyebabkan PT. Media Interaksi Umat (PT. MIU) menggeser PT. Sinar Kasih. Secara prinsipil, jati diri Suara Pembaruan ini tidak jauh berbeda dengan Sinar Harapan.

Bila dilihat kembali ke belakang, Sinar Harapan pada mulanya adalah surat kabar yang berafiliasi dan menyatakan sebagai koran Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Ketika berubah menjadi *Suara Pembaruan*, mottonya adalah : “Memperjuangkan harapan dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan namanya, harian ini membawa misi pembaruan sebagai suatu proses yang hidup dan berlanjut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sistem demokrasi Pancasila.<sup>29</sup>

Seiring perkembangan jaman, Suara Pembaruan berkembang menjadi media cetak sore nasional. Dengan total oplah sebanyak 151.273 eksemplar Suara Pembaruan melayani pembaca setianya di seluruh Indonesia dengan komposisi 88% wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan, Bekasi serta 12% untuk seluruh Indonesia. Untuk selalu memberi warna dalam setiap edisinya, Suara Pembaruan memiliki beberapa karakter pemberitaan yang selalu menjadi patokan. Yang pertama adalah inspiratif, dimana Suara Pembaruan selalu berusaha membantu pembaca untuk menemukan sesuatu yang baru, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan talenta. Selain menjadi media yang bertugas memberikan informasi, Suara Pembaruan juga mempunyai kewajiban menyampaikan berita - berita yang edukatif bagi pembacanya, agar mencerdaskan pembaca serta bangsa.

---

<sup>29</sup> Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas politik dalam Media Massa*. Granit, Jakarta, 2004 hal 127.

Di tengah-tengah tantangan zaman serta krisis global, Suara Pembaruan juga memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memberikan harapan kepada masyarakat. Harapan ini dibangun dengan menyajikan berita – berita yang optimistis serta memiliki harapan agar pembacanya terus memiliki motivasi dan gairah guna memperbaiki kualitas hidup dan mewujudkan cita – citanya. Selain itu, Suara pembaruan juga senantiasa menyajikan berita – berita yang antisipatif, yang bertujuan membantu pembacanya mempersiapkan masa depan dengan informasi yang relevan, aktual, dinamis, objektif, serta independen. Berikut ini adalah struktur organisasi<sup>30</sup> di surat kabar harian Suara Pembaruan :

- Penerbit : PT. Media Interaksi Utama
- Ijin Usaha : SIUPP no. 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987
- Alamat Redaksi : The Aryaduta Suites Tower A Lantai 1, Jl.  
Garnis Dalam No. 8, Karet Semanggi.  
Jakarta 12930
- Presiden Direktur : Wim Tangkilisan
- Direktur : Randolph Latumahina
- Pemimpin Redaksi : Sabam Siagian
- Wakil ketua : Dr. Sutarno

---

<sup>30</sup> [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com)